

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Pengertian ini telah dikenal luas dalam kehidupan manusia. Posisi manusia sebagai makhluk sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupannya di dunia. Sebuah adagium klasik mengatakan, “*no man is an island*”, yang berarti tidak ada seorang manusia yang bisa hidup sendiri. Dalam kapasitas sosial tersebut, manusia memiliki ketergantungan alami satu sama lain. Dengan kata lain, menjadi makhluk sosial membuat manusia memiliki keterhubungan dengan “ada-ada” atau entitas yang lain. Keberadaannya sebagai makhluk sosial juga menuntut manusia untuk hidup dalam bangunan relasi dengan yang lain. Dalam relasi tersebut, ada proses sosialisasi yang memungkinkan perkembangan individu di dalam kelompok sosial tertentu.

Tuntutan lain dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah keharusan untuk tinggal dalam lingkungan sosial tertentu. Lingkungan sosial ini sering diidentifikasi sebagai lingkungan sosial kemasyarakatan. Dalam lingkungan tersebut, individu berpartisipasi untuk mewujudkan dirinya di hadapan yang lain. Perwujudan diri itu berlangsung dalam tatanan-tatanan yang ada pada lingkungan masyarakat tertentu. Tatanan-tatanan dibuat sebagai panduan atau pedoman hidup bersama demi mewujudkan keteraturan dalam hidup bersama. Dengan demikian, ada elemen-elemen dasar yang membentuk manusia menjadi makhluk sosial. Secara sosiologis, elemen-elemen itu disebut fakta sosial. Fakta sosial itu terdiri dari kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, sistem sosial, keluarga, pemerintahan, institusi politik, kebiasaan, hukum, Undang-Undang, nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat dan lain-lain.¹

Fakta sosial tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial manusia berhubungan pula dengan struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial didefinisikan sebagai pola hak dan kewajiban masing-masing individu dalam suatu sistem interaksi, yang terwujud dalam rangkaian yang relatif stabil dalam jangka

¹ Bernard Raho, *Sosiologi* (Mauere: Ledalero, 2016), hlm. 37.

waktu tertentu.² Dalam institusi atau struktur sosial, kebutuhan sosial manusia akan terpenuhi, yakni melalui interaksi sosial dan peran sosial. Namun, berada dalam institusi sosial tertentu menuntut individu untuk tunduk pada kaidah-kaidah dan pranata-pranata sosial yang ada dalam kelompok sosial itu. Selain itu, kelompok sosial tertentu biasanya memiliki sistem-sistem terstruktur dan prosedural. Kelompok ini memiliki struktur yang jelas untuk menegaskan peran masing-masing individu di dalam kelompok tersebut. Individu yang berada dalam struktur tertentu memiliki peran yang berbeda dengan individu yang berada pada struktur lainnya.

Salah satu peran kunci dalam organisasi institusional adalah pemimpin. Pemimpin sendiri memiliki banyak nama, yakni bisa disebut kepala, ketua, bos, pimpinan, manajer, direktur, kapten dan komandan. Dalam struktur hierarki tertentu, pemimpin berada pada posisi yang paling tinggi atau paling atas. Posisi tersebut dengan sendirinya memberi otoritas tertentu kepada pemimpin, yakni memimpin kelompok, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas kebijakan tertentu. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk memberi teladan bagi massa yang dipimpinnya serta memiliki kemampuan untuk mengayomi dan menganimasi kelompoknya. Peran pemimpin tentu berbeda-beda tergantung pada jenis organisasi atau institusi yang dipimpinnya. Pentingnya pemimpin dalam setiap organisasi institusional ini membuat pemimpin menjadi sosok kunci dalam perkumpulan atau institusi sosial apa saja.

Yuval Noah Harari dalam buku *Sapiens*, mengungkapkan bahwa salah satu kekuatan utama Homo Sapiens dalam mempertahankan spesiesnya adalah adanya sistem-sistem berupa tatanan khayalan yang diciptakan bersama.³ Tatanan khayalan tersebut kemudian dipercayai oleh khalayak sehingga masyarakat pun dengan sendirinya mematuhi tatanan yang diciptakan itu. Manusia menciptakan tatanan khayalan tersebut dalam bentuk jaringan kerja sama, baik yang represif maupun yang produktif. Pada zaman imperialisme, jaringan kerja sama itu dibentuk untuk melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap kelompok-kelompok yang lebih rentan. Selain jaringan kerja sama, kepemimpinan juga adalah salah satu bentuk

² Parsudi Suparlan, "Masyarakat: Struktur Sosial." *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Akademika Pressindo (1986)., hlm. 1.

³ Yuval Noah Harari, *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia*, terj. Damaring Tyas Wulandari Palar (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 135.

tatanan khayalan yang diciptakan manusia, yang kemudian sangat berguna dalam mempertahankan spesies Homo Sapiens di muka bumi. Dengan adanya pemimpin, manusia memiliki peradaban yang lebih sistematis dan teratur. Keteraturan dalam sistem-sistem tertentu membedakan peradaban manusia Sapiens dengan spesies-spesies manusia yang lain.

Menurut Yuval, sistem paling purba yang berhasil membentuk kesadaran kolektif manusia adalah mitos.⁴ Mitos memiliki kekuatan untuk memberi sugesti tertentu melalui cerita-cerita mistis yang dapat berpengaruh secara langsung bagi kelompok yang mempercayainya. Mitos-mitos tersebut berasal dari imajinasi manusia. Dengan imajinasi yang sama, manusia menciptakan tatanan khayalan yang lain untuk membangun kerja sama massal. Kerja sama massal yang dibentuk berdasarkan tatanan yang diciptakan bersama itu, memungkinkan terbentuknya masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi, tatanan khayalan yang diciptakan tersebut selain memiliki pengaruh terhadap permulaan pembentukan kerja sama massal, tetapi juga menciptakan ironi baru. Tatanan tersebut dengan sendirinya membentuk masyarakat dalam hierarki tertentu. Hierarki-hierarki tersebut membagi masyarakat dalam kelas-kelas tertentu. Dengan demikian, sering ditemukan perbedaan kelas dalam masyarakat, meskipun berada dalam kelompok masyarakat yang sama.

Persoalan yang sama juga sering ditemukan dalam peran pemimpin dalam sejarah peradaban manusia. Di satu sisi, pemimpin memiliki peran vital untuk mendorong kemajuan peradaban, namun di sisi lain pemimpin juga dapat menciptakan kesenjangan sosial karena adanya perbedaan antara atasan dan bawahan. Para pemimpin yang berada pada tingkat atas dalam kelas sosial memiliki kehidupan yang sangat mapan, sedangkan masyarakat atau bawahan sering menjadi sasaran diskriminasi dan penindasan. Dalam perspektif ini, seorang pemimpin selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Hal ini terjadi karena pemimpin memiliki legitimasi khusus untuk mempengaruhi siapa saja yang dipimpinnya melalui kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusannya. Dapat dikatakan juga bahwa substansi dasar semua struktur sosial juga selalu berkaitan dengan kekuasaan.

⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

Dewasa ini, kekuasaan selalu dihubungkan dengan praktik politik. Kaitan ini memang lebih mudah diidentifikasi karena politik merupakan pintu masuk bagi kekuasaan. Dalam model-model kekuasaan seperti pada negara-negara demokrasi dan aristokrasi, kekuasaan itu ditentukan dalam kontestasi politik. Di sisi lain, politik membuka ruang bagi orang untuk menentukan arah kekuasaannya, semisal seorang penganut egalitarianisme akan menjadi penguasa yang populis ketika memperoleh atau menduduki kekuasaan tertentu. Selain itu, kekuasaan juga memiliki hubungan dengan aspek-aspek lain seperti hukum, sistem ketatanegaraan, ekonomi dan sosial kebudayaan. Karena kompleksnya kekuasaan tersebut, kekuasaan dengan sendirinya memiliki beragam bentuk.

Salah satu bentuk kekuasaan yang paling lazim adalah kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional ini memiliki kaitan dengan kebiasaan, adat istiadat dan tradisi. Dalam kekuasaan tradisional, terdapat unsur-unsur yang sengaja dipertahankan dengan dalil menjaga kemurnian tradisi dan adat istiadat. Kekuasaan tradisional biasanya bersifat feodal dan diwariskan secara turun-temurun.⁵ Para pemimpin dalam model kekuasaan ini biasanya memiliki privilese khusus untuk melakukan sesuatu atau untuk memperoleh sesuatu. Kebiasaan demikian kemudian dipelihara dan diwariskan hingga turun-temurun karena dianggap sebagai kewajiban terhadap adat istiadat ataupun tradisi. Misalnya, di tempat-tempat tertentu, pemimpin adat memiliki hak-hak khusus seperti mendapat jatah kepala hewan ketika terjadi penyembelihan hewan, atau berhak mendapatkan upeti atas hasil kebun dari masyarakat tertentu. Kondisi demikian diterima secara wajar oleh masyarakat tradisional karena dianggap sebagai bentuk kepatuhan mutlak terhadap adat istiadat. Faktanya masyarakat lokal lebih mudah patuh terhadap ketentuan-ketentuan adat dan tradisi daripada ketentuan-ketentuan formal lainnya. Hal demikian semakin menegaskan legitimasi para pemimpin tradisional sehingga mereka terkesan memiliki kekuasaan tertentu dalam lingkungan masyarakat tradisional.

Hal yang sama juga terjadi di kampung adat Bubu. Kampung adat ini memiliki struktur kepemimpinan, yang bila ditelusuri, memiliki sedikit indikasi kekuasaan. Para pemimpin adat di kampung ini memiliki privilese khusus dalam

⁵ Budi Sunarso, *Teori Kepemimpinan* (Yogyakarta: CV. Madani Berkah Abadi, 2023), hlm. 29.

hal-hal tertentu yang menegaskan posisi mereka sebagai penguasa kampung atau *lewotana*. Akan tetapi, indikasi ini perlu ditinjau lagi mengingat uniknya sistem kepemimpinan yang ada di kampung adat tersebut. Struktur kepemimpinan yang ada di tempat tersebut tidak bersifat piramidal atau hierarkis sebagaimana struktur kepemimpinan pada umumnya. Memang ada stratifikasi dalam sistem kepemimpinan, namun strata-strata tersebut lebih menonjol dalam hal peran dan tugas-tugas.

Sebagai salah satu wilayah dari kelompok etnis yang disebut *Lamaholot*, kampung adat Bubu juga memiliki sistem kepemimpinan yang umumnya sama dengan kampung-kampung adat di wilayah Lamaholot. Sistem kepemimpinan Lamaholot biasanya terdiri dari empat unsur pimpinan yang saling bertautan, yakni *Koten*, *Kelen*, *Hurit* dan *Maran*. Keempat unsur tersebut memiliki kedudukan yang hampir setara, namun memiliki peran yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaan peran, keempatnya memiliki jaringan relasi kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional masyarakat adat Lamaholot tidak memiliki basis kekuasaan tertentu. Para pemimpin adat memang memiliki peran dan wewenang-wewenang khusus yang menegaskan posisi mereka sebagai *kebelen raya* atau orang-orang besar dalam kampung, namun posisi tersebut tidak memberi mereka kekuasaan mutlak untuk memerintah. Mereka menjalankan peran tersebut semata-mata untuk melayani komunitas masyarakat adat. Dalam perspektif ini, sistem kepemimpinan tersebut dapat disebut sebagai salah satu bentuk jaringan atau relasi kuasa yang produktif.

Relasi kuasa yang produktif dapat menjadi tonggak utama pembangunan suatu organisasi sosial. Hal ini terjadi karena dalam relasi kuasa yang demikian, proses penyelenggaraan sebuah institusi tidak bergantung pada otoritas pemimpin semata tetapi juga pada semua unsur yang ada dalam institusi tersebut. Secara teoretis, relasi kuasa tersebut dibahas oleh Michel Foucault, seorang filsuf kontemporer. Penulis menilai pemikiran Foucault sangat relevan sebagai rujukan sekaligus menjadi kajian pembandingan terhadap sistem kepemimpinan tradisional kampung adat Bubu. Pemikiran filsuf ini dipilih karena ide-idenya bersinggungan dengan aspek-aspek dasar kehidupan manusia, baik dari segi ilmu sosial maupun dari sisi filosofis.

Kepemimpinan tradisional di kampung adat Bubu itu perlu dibahas dalam kerangka filosofis mengingat sistem kepemimpinan yang demikian merupakan salah satu sistem yang tetap eksis di tengah bangunan institusi-institusi modern seperti negara dan agama. Meskipun saat ini negara dan agama lebih berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, namun kehadiran kedua institusi tersebut ternyata tidak mampu menyingkirkan peran adat istiadat dan tradisi dari kehidupan masyarakat. Keberadaan adat istiadat dan tradisi tetap terpelihara dengan baik karena keyakinan kuat akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kepemimpinan tradisional yang ada juga masih tetap dilestarikan hingga saat ini karena kepemimpinan tersebut tidak menunjukkan upaya untuk mempertahankan status *quo* dalam masyarakat, melainkan untuk mewujudkan diri dalam bentuk pelayanan dan pengabdian kepada sesama.

Salah satu alasan utama diskursus kepemimpinan ini perlu ditinjau dari aspek filosofis adalah karena adanya perbedaan pemahaman atas kekuasaan dan kuasa. Kedua term ini cenderung digunakan untuk menegaskan otoritas pimpinan. Seorang pemimpin memiliki privilese dan legitimasi dalam hal-hal khusus sehingga dia sering disebut sebagai orang yang berkuasa atau yang memiliki kekuasaan. Namun, sebutan memiliki kekuasaan, dalam perspektif tertentu selalu berarti memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan represif atau intimidatif. Dalam konteks pemikiran Foucault, term ini cukup krusial sehingga perlu ditegaskan penggunaannya karena arah dasar pemikiran Foucault adalah pembentukan manusia sebagai subjek. Pembentukan subjek itu terjadi apabila setiap individu memaksimalkan kuasa-kuasa yang ada dalam dirinya. Sebaliknya, pengerdilan subjek dapat terjadi jika ia berada dalam genggam kekuasaan.

Kepemimpinan dapat disebut juga sebagai jalan pembentukan subjek sebagaimana yang dimaksud oleh Foucault. Karena itu, term yang cocok untuk menegaskan kepemimpinan dalam konteks pembentukan subjek menurut Foucault adalah term “kuasa”. Dalam kerangka ini, pemimpin tradisional yang dibahas di sini memiliki kuasa dalam dirinya sendiri dan menggunakan kuasa tersebut untuk memaksimalkan perannya sebagai seorang pemimpin. Di samping itu, kepemimpinan tradisional juga memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek lain, yakni aspek sosial dan antropologis.

Secara antropologis, sebuah kampung umumnya memiliki integrasi sosial yang tinggi karena adanya hubungan kekerabatan yang terjalin erat.⁶ Hubungan kekerabatan tersebut memiliki dampak terhadap mutu relasi sosial masing-masing elemen masyarakat. Masyarakat dengan sendirinya memiliki ikatan sosial yang dapat memperkokoh institusi lokal di kampung tersebut. Dengan demikian, peluang terjadinya tindakan represif dan intimidatif pun semakin berkurang. Maka dapat dikatakan bahwa relasi antarunsur dalam masyarakat adat pada sebuah perkampungan adalah bentuk relasi kuasa yang memungkinkan terbentuknya jaringan kerja sama yang produktif. Meskipun demikian, hal tersebut dapat dikategorikan hanya sebagai hipotesis awal dari tulisan ini karena kepemimpinan tradisional yang ada di kampung adat Bubu memiliki latar historis dan nilai-nilai etis yang jauh lebih kompleks dari sekadar jaringan kerja sama antarindividu semata. Penulis mengupayakan sebuah kajian empiris dan juga melalui studi terhadap pemikiran-pemikiran Foucault sebagai titik tolak pembandingan untuk membaca kepemimpinan tradisional di kampung adat Bubu dalam perspektif relasi-relasi kuasa Michel Foucault.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengulas tema tersebut dalam skripsi yang berjudul “Membaca Sistem Kepemimpinan Tradisional Kampung Adat Bubu Menurut Perspektif Relasi-relasi Kuasa Michel Foucault.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dikatakan bahwa pokok permasalahan utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kepemimpinan tradisional kampung adat Bubu ditinjau dari perspektif relasi-relasi kuasa Michel Foucault. Secara keseluruhan, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan sistem kepemimpinan tradisional kampung adat Bubu? Poin-poin yang dibahas dalam pokok permasalahan ini, yakni definisi dan arti kepemimpinan, gambaran umum tentang kampung adat Bubu, peran dan struktur kepemimpinan tradisional kampung adat Bubu.

⁶ Thomas Hylland Eriksen, *Antropologi Sosial dan Budaya Sebuah Pengantar*, terj. Yosef Maria Florisan, (Maukere: Penerbit Ledalero, 2009), hlm. 122.

2. Bagaimana konsep-konsep filosofis Michel Foucault, khususnya yang berkaitan dengan diskursus kuasa dan relasi-relasi kuasa? Poin-poin utama dalam pokok persoalan ini adalah riwayat hidup Michel Foucault, landasan pemikiran Michel Foucault, konsep-konsep filosofis Michel Foucault, dan relasi-relasi kuasa Michel Foucault.
3. Bagaimana sistem kepemimpinan tradisional kampung adat Bubu ditinjau dari perspektif relasi-relasi kuasa Michel Foucault. Pokok permasalahan ini memuat kajian berupa kepemimpinan tradisional kampung Adat Bubu menurut perspektif relasi-relasi kuasa Michel Foucault.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan khusus penulisan karya ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan Sarjana Filsafat (S1) program studi Ilmu Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Selain itu, ada beberapa tujuan umum, yakni:

1. Menjelaskan makna kepemimpinan, mendeskripsikan sistem kepemimpinan tradisional kampung adat Bubu dan peran masing-masing unsur kepemimpinan.
2. Menjelaskan riwayat hidup, perjalanan karier dan topik-topik penting dalam pemikiran Michel Foucault.
3. Menjelaskan hubungan kepemimpinan tradisional kampung adat Bubu dari sisi filosofis, khususnya dalam pemahaman kuasa yang produktif menurut perspektif relasi-relasi kuasa Michel Foucault.

Tulisan ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis. Agar penulis sendiri dapat masuk ke dalam konteks kebudayaan masyarakat lokal dan membaca hal tersebut dari perspektif yang lebih jauh, yakni menurut perspektif sosio-kultural dan filsafat.
2. Bagi pembaca. Agar para pembaca dapat memahami sebuah kajian ilmiah yang berbasis pada realitas dan memahami tinjauan filosofis menurut realitas tersebut, khususnya realitas kepemimpinan tradisional kampung adat Bubu.
3. Bagi masyarakat setempat. Agar masyarakat setempat semakin memahami kebudayaannya dalam perspektif yang lebih luas sehingga mereka dapat mencintai dan mengakarkan diri pada tradisi dan kebudayaan tersebut.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengedepankan studi kepustakaan untuk menemukan rujukan-rujukan yang sesuai dengan tema yang dipilih. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dan observasi terhadap objek penelitian yang dimaksud. Dengan demikian, tulisan ini adalah sebuah upaya komparasi pemikiran-pemikiran Michel Foucault, sebagai filsuf dan juga sebagai ahli ilmu sosial, dengan realitas sosial dalam sistem kepemimpinan di kampung adat Bubu.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab utama. Bab I menampilkan latar belakang juga hipotesis awal penulis mengenai kepemimpinan dan kaitannya dengan relasi-relasi kuasa Michel Foucault. Bab I juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode serta sistematika penulisan. Pada Bab II, penulis menampilkan sistem kepemimpinan tradisional Kampung Adat Bubu. Bagian ini memuat definisi kepemimpinan tradisional dan deskripsi seputar kampung adat Bubu dan sistem kepemimpinan kampung adat tersebut. Bab III memuat ulasan mengenai Michel Foucault dan pemikiran-pemikirannya, khususnya pemikirannya tentang relasi-relasi kuasa. Bab ini memuat biografi Michel Foucault, Michel Foucault sebagai filsuf dan pemikir sosial serta filsuf-filsuf yang dipengaruhi dan mempengaruhi pemikiran Michel Foucault. Bab IV memuat pembahasan secara komprehensif mengenai hubungan sistem kepemimpinan tradisional dengan teori relasi-relasi kuasa Michel Foucault. Pada bagian tersebut, penulis membuat kajian pembandingan sistem kepemimpinan tradisional di kampung adat Bubu berdasarkan analisis reflektif pemikiran Michel Foucault. Bagian terakhir, Bab V memuat kesimpulan dan saran dari penulis.